

Judul : Tetapkan status hukum Firli Bahuri
Tanggal : Minggu, 29 Oktober 2023
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 2

Tetapkan Status Hukum Firli Bahuri

PENYIDIK Polri harus cermat dalam menangani kasus dugaan pemerasan yang menyeret Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri. Jangan sampai tindakan yang nantinya diambil justru berujung blunder bagi institusi Korps Bhayangkara.

Demikian dikatakan pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (Isses) Bambang Rukminto saat dihubungi, kemarin. Ia pun mengingatkan bahwa dalam waktu dekat seharusnya polisi bisa segera memastikan status hukum terhadap Firli atau tetap menjadi saksi.

"Ini akan kontraproduktif dari upaya membangun *public trust* bila tidak segera dinaikkan statusnya atau dihentikan penyidikannya setelah upaya-upaya penggeledahan," kata Bambang.

Ia juga menyoroti upaya Polda Metro Jaya yang menggeledah dua rumah Firli di Jakarta Selatan dan Bekasi, Jawa Barat. Menurutnya, dari kegiatan itu, sejatinya penyidik telah mendapatkan bukti tambahan.

Di sisi lain, membiarkan kasus semakin berlarut tanpa ada kejelasan siapa tersangkanya justru akan memunculkan asumsi publik yang menilai bahwa kasus tersebut hanya gimik dari isu yang sedang hangat di masyarakat.

"Kalau tidak ada kepastian, akan muncul opini publik, seperti kepolisian tidak bekerja profesional karena ada pertimbangan-pertimbangan penyelesaian di luar hukum dan ada intervensi politik pada kepolisian," terang dia.

Sebanyak 55 orang saksi telah diperiksa untuk membuat benderang kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syarif Yasin Limpo. Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak mengungkapkan penyidik akan kembali memanggil Firli untuk pemeriksaan lanjutan. "Kita agendakan. Kita masih memerlukan beberapa keterangan tambahan dari Saudara FB selaku Ketua KPK," ujar Ade.

Kuasa hukum Firli Bahuri, Ian Iskandar, menuturkan status kliennya masih saksi. "Posisi beliau masih sebagai saksi. Tidak ada peningkatan status beliau, hanya sebagai saksi," terang Ian.

Ian menyampaikan sampai saat ini kliennya menerima sejumlah tuduhan, seperti membocorkan dokumen penyidikan hingga melakukan dugaan pemerasan. Namun, kedua dugaan tersebut tak terbukti sejalan dengan berakhirnya penggeledahan di dua kediaman Firli.

Secara terpisah, mantan pimpinan KPK Bambang Widjojanto menilai Dewan Pengawas (Dewas) KPK terlalu memanjakan Firli Bahuri. Hal itu buntut dari sikap semena-mena Firli yang meminta penjadwalan ulang pemeriksaan dugaan pelanggaran etik pada 8 November.

Sikap Firli menjadi pukulan bagi Dewas KPK sehingga Dewas pun harus bersikap keras dan tegas. "Selama ini Dewas memanjakan dia, sih. Jadi dia punya kelakuan kayak begitu," tandasnya. (Far/Boh/J-2)